

**PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI
NASIONAL (DTSEN) DALAM PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program
Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



OLEH:

**RAHMIATI
NPM. 220411071**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 17
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

SEKRETARIS



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

- | | | |
|------------------------------|----------------------|---|
| 1. DESRIADI, S.Sos., M.Si | (Pembimbing I) | () |
| 2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji I) | () |
| 3. RISVANDI, S.Pd., M.Si | (Anggota Penguji II) | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL
EKONOMI NASIONAL (DTSN) DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : RAHMIATI
NPM : 220411071
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : RAHMIATI

NPM : 220411071

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 17 Juni 2026



RAHMIATI
NPM. 220411071

MOTTO

“ Belajar bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri yang harus dijalani dengan kesungguhan.”

(John Dewey)

“ Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis, proses belajar yang panjang akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik.”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang tidak pernah berhenti memberikan cinta, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Terima kasih atas segala usaha yang telah diberikan demi pendidikan saya, atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah saya, serta atas kesabaran dalam membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

Kepada saudara-saudara tersayang abang Angga Setiadi dan Marjan, Kakak Rahayu Ningtiyas serta adik Zubaida dan Zulmursid, terima kasih atas semangat, keceriaan, serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan saya untuk terus berjuang dan menjadi contoh yang lebih baik untuk kalian nantinya.

Kepada sahabat terbaik saya Maimuna, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan saling menyemangati selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Kebersamaan kita adalah bagian berharga yang tidak akan pernah terlupakan.

Dan yang terakhir, untuk saya sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang terus dilalui. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa depan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

**RAHMIATI
NPM. 220411071**

KATA PENGANTAR

رومكيدعم لاسلامه تا كربو الله اة

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan (*yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur*) mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **“Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi”**, yang penulis angkat merupakan kajian dan telah mencoba menemukan sebuah urgensi Pngelolaan dari suatu agenda kebijakan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan DTSEN telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituil berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi, M.Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh staffnya, sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing, membantu, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini.
3. Bapak Alsar Andri, Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kemudian fasilitas dalam menimba ilmu di fakultas ilmu sosial.
4. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing, membantu, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini.
5. Seluruh staff pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Asmi Haris dan Ibunda Erna Wilis. Terima kasih Telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, cucuran keringat dan air mata serta do'a dan pengorbanan yang tiada hentinya.
7. Saudara dari penulis, Angga Setiadi, Rahayu Ningtyas, Marjan, Zubaida dan Zul Mursid yang telah senantiasa memberikan semangat kasih sayang.
8. Untukmu sahabat-sahabat karibku yang senantiasa memberikan motivasi, support, semangat, nasehat serta perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar untuk penulis. Hanya doa yang bisa kupanjatkan kepada Sang Maha Pencipta agar kita dipertemukan di Syurga-Nya serta senantiasa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat.
9. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

روم کیل عم لاسلا وحمه تا کربو الله اة

Teluk Kuantan, 17 Juni 2026

Penulis

**RAHMIATI
NPM. 220411071**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK INDONESIA	xvii
ABSTRAK INGGRIS.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara	11
2.1.2. Teori Kebijakan Publik	14
2.1.2.1. Formulasi Kebijakan.....	18
2.1.2.2. Implementasi Kebijakan	19
2.1.2.3. Analisis Kebijakan.....	22
2.1.3. Teori Manajemen Kebijakan Publik	24
2.1.4. Teori Good Government	26

2.1.5. Teori Good Governance.....	28
2.1.5.1. Tata Kelola Bantuan Sosial	32
2.1.5.2. Tata Kelola Bansos Sembako	34
2.1.5.3. Tata Kelola Program Keluarga Harapan (PKH).....	36
2.1.5.4. Tata Kelola Bantuan Sosial YAPI (Yatim Piatu)	37
2.2. Kerangka Pemikiran.....	39
2.3. Hipotesis.....	39
2.4. Definisi Operasional.....	40
2.4.1. Akuntabilitas	40
2.4.2. Partisipasi Masyarakat	40
2.4.3. Transparansi	41
2.4.4. Kualitas Pelayanan Publik	41
2.4.5. Keadilan	42
2.4.6. Pengendalian Eksternal	42
2.5. Operasional Variabel.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Informan	44
3.3. Sumber Data.....	45
3.3.1. Data Primer	45
3.3.2. Data Sekunder	45
3.4. Fokus Penelitian.....	45
3.5. Lokasi Penelitian	46
3.6. Metode Pengumpulan Data	46
3.6.1. Pengamatan (Observasi)	46
3.6.2. Wawancara.....	46
3.6.3. Dokumentasi	47
3.7. Metode Analisis Data.....	47
3.7.1. Pengumpulan Data (<i>data collection</i>)	47
3.7.2. Reduksi Data (<i>data reduction</i>).....	48
3.7.3. Penyajian Data (<i>data display</i>).....	48

3.7.4. Penarikan Kesimpulan (<i>conclusion drawing/verification</i>)	48
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	50
4.2. Struktur Organisasi	54
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	56
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	66
6.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	: Data Kemiskinan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	3
1.2	: Rekapitulasi Bantuan Sosial di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	4
2.1	: Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	43
3.1	: Informan Penelitian Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	44
3.2	: Jadwal Penelitian Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	39
4.1	: Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi..	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I : Daftar Wawancara Penelitian Tantang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	73
II : Dokumentasi Penelitian Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi	81
III : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 083/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara	86
IV : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor 101/FIS/UNIKS/XI/2025 Tentang Permohonan Riset	87
V : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 226/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	88
VI : Surat Balasan Riset Dari Dinas Sosial Tentang Penelitian Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi	89
VII : Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.....	90

VIII	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.....	93
IX	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.....	94
X	: Daftar Riwayat Hidup Penulis	95

ABSTRAK

PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

RAHMIATI
NPM: 220411071

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan data yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran penting dalam mengelola DTSEN untuk menghasilkan data yang valid dan berkualitas. Untuk menghasilkan data yang berkualitas perlu dilakukan pemuktahiran data yaitu melalui proses usulan data, verifikasi dan validasi data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses usulan data, verifikasi data dan validasi data DTSEN di Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial telah dilaksanakan melalui proses usulan, verifikasi, dan validasi data, namun belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan, keterlambatan pembaruan data, tingkat partisipasi masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.

Kata Kunci : DTSEN, Usulan Data, Verifikasi Data, Validasi Data

ABSTRACT

MANAGEMENT OF NATIONAL SOCIO-ECONOMIC SINGLE DATA (DTSEN) IN THE DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE BY THE SOCIAL SERVICES, COMMUNITY EMPOWERMENT AND VILLAGE OF KUANTAN SINGINGI DISTRICT

By:

***RAHMIATI
NPM:220411071***

National Socio-Economic Single Data (DTSEN) is data used by the government to determine the target recipients of social assistance. The Kuantan Singingi Regency Social Service has an important role in managing DTSEN to produce valid and quality data. To produce quality data, data updating is necessary, namely through the process of data proposal, verification and validation of data. The purpose of this study is to determine and analyze the management of the National Socio-Economic Single Data (DTKS) in the distribution of social assistance at the Kuantan Singingi Regency Social Service and to determine and analyze the supporting and inhibiting factors in the process of data proposal, data verification and validation of DTSEN data at the Kuantan Singingi Regency Social Service. This study is a qualitative study using a descriptive approach method. The results of the study indicate that the management of DTSEN in the distribution of social assistance has been implemented through the process of proposal, verification and validation of data, but has not run optimally. There are still data discrepancies with community conditions in the field, delays in data updates, levels of community participation and limited human resources that result in social assistance potentially not being on target.

Keywords: DTSEN, Proposed data, Data Verification, Data Validation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menghapuskan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pemberian bantuan sosial dan menggantinya dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak tahun 2025. Keputusan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2025, yang menetapkan bahwa DTSEN menjadi basis data tunggal nasional untuk semua program sosial dan ekonomi, termasuk penyaluran bantuan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Menurut Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), DTKS tidak lagi digunakan sebagai basis data program bantuan sosial karena DTSEN telah hadir dengan cakupan yang jauh lebih luas, mencakup 100% penduduk Indonesia dari semua lapisan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam satu sistem data nasional.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem perlindungan sosial sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu instrumen kunci dalam upaya tersebut adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang disusun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. DTSEN memuat data individu, rumah tangga miskin, dan rentan miskin yang dijadikan acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Untuk Yatim Piatu dan lainnya. Dalam konteks lokal, Kabupaten Kuantan Singingi

sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau juga mengandalkan DTSEN sebagai dasar dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) sangat penting dalam mengelola data ini agar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pelaksanaan pengelolaan DTSEN di tingkat daerah masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi teknis maupun kelembagaan.

Badan Pusat Statistik (2020) melalui publikasi kemiskinan dan perlindungan sosial menegaskan bahwa kualitas data sosial ekonomi sangat menentukan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. BPS menilai bahwa integrasi data pusat dan daerah menjadi syarat utama agar bantuan sosial dapat menjangkau rumah tangga miskin dan rentan secara tepat sasaran.

Permasalahan umum yang sering terjadi adalah tidak sinkronnya data yang tersedia dengan kondisi riil di lapangan, di mana masih terdapat penerima bantuan yang tidak layak, serta sebaliknya, warga miskin yang layak namun tidak terdaftar dalam DTSEN.

DTSEN digunakan sebagai sumber data dalam menentukan masyarakat yang lebih diutamakan mendapat bantuan sosial dari pemerintah terutama yang bersumber dari anggaran Kementerian Sosial (APBN). Kualitas data yang diawali dengan pendataan sebagai dasar pemberian bantuan sangatlah penting agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Pemerintah Daerah melakukan pendataan di lapangan sebagai data usulan untuk ditetapkan menjadi DTSEN.

Tabel 1.1. Data Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun (Year)	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	580.453	29,34	8,91
2021	599.163	28,90	8,97
2022	638.678	26,61	8,24
2023	693.493	26,61	8,07
2024	736.050	25,56	7,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Data indikator kemiskinan menunjukkan adanya dinamika perubahan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, serta persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang tersaji, garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu dari Rp 580.453 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp 736.050 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2024. Peningkatan garis kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan dasar hidup semakin meningkat, sehingga keluarga miskin memerlukan intervensi kebijakan sosial yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.

Meskipun terjadi kenaikan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 29,34 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 25,56 ribu jiwa pada tahun 2024. Begitu pula dengan persentase penduduk miskin yang menurun dari 8,91% pada 2020 menjadi 7,89% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kontribusi kebijakan perlindungan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, yang berperan dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2. Rekapitulasi Bantuan Sosial Kab.Kuantan Singingi

No.	KECAMATAN	SEMPAKO					PKH					YAPI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kuantan Mudik	1207	1583	1433	1470	1550	1027	1079	924	868	871	4	3	16	20	16
2.	Kuantan Tengah	1346	2287	2076	2020	2066	1218	1418	1200	1108	1098	8	8	30	53	37
3.	Singingi	1567	1849	1712	1623	1631	1072	1125	971	895	871	7	7	7	21	9
4.	Kuantan Hilir	307	501	455	430	440	267	280	247	239	229	0	0	4	12	7
5.	Cerenti	649	1017	931	888	808	555	605	517	499	454	3	3	8	20	16
6.	Benai	1046	1163	1053	1019	1054	622	735	611	608	645	1	1	14	15	11
7.	Gunung Toar	960	1007	951	910	940	635	647	525	489	525	0	0	10	16	10
8.	Singingi Hilir	1482	1691	1492	1458	1433	997	1047	834	787	766	5	5	21	26	12
9.	Pangean	1490	2199	2007	1942	1953	989	1421	1237	1187	1226	1	1	15	26	8
10.	Logas Tanah Darat	1014	1146	1035	1000	969	624	652	553	519	502	1	1	8	6	1
11.	Inuman	810	1134	1023	972	988	574	703	578	537	535	0	0	9	10	13
12.	Hulu Kuantan	665	751	696	685	724	518	529	446	420	419	3	3	2	13	8
13.	Kuantan Hilir Seberang	552	573	526	520	554	308	364	313	311	328	0	0	2	6	4
14.	Sentajo Raya	1283	1747	1559	1519	1552	948	1059	846	796	822	15	14	8	34	15
15.	Pucuk Rantau	450	448	426	420	427	190	294	244	239	234	0	0	1	1	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi

Data Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial berupa Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan YAPI mengalami fluktuasi di seluruh kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Kuantan Tengah, Pangean, Singingi, dan Sentajo Raya secara konsisten memiliki jumlah penerima bantuan yang relatif tinggi, sementara kecamatan lain seperti Pucuk Rantau dan Kuantan Hilir Seberang menunjukkan jumlah penerima yang lebih rendah.

Selain itu, terjadi perubahan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun pada jenis bantuan yang sama, baik Bantuan Sembako maupun PKH. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika data penerima manfaat yang dipengaruhi oleh proses pendataan, pemutakhiran, dan penetapan sasaran bantuan sosial. Program YAPI juga menunjukkan variasi jumlah penerima antar kecamatan dan antar tahun, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun-tahun tertentu.

Fluktuasi dan perbedaan jumlah penerima bantuan sosial antar kecamatan tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir. Oleh karena itu, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi krusial dalam memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.

Variasi jumlah penerima bantuan pada masing-masing kecamatan menunjukkan pentingnya pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pendataan, verifikasi, dan validasi penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran, transparan, serta sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam implementasinya, pengelolaan DTSEN masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akurasi data, ketepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan pembaruan data, hingga lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Kondisi ini berdampak pada distribusi bantuan sosial yang belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran.

Perbedaan jumlah penerima bantuan sosial antar kecamatan dan fluktuasi data dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengelolaan data bantuan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi data ganda, inclusion error (penerima tidak layak), maupun exclusion error (masyarakat layak tetapi tidak menerima bantuan). Oleh karena itu, implementasi DTSEN menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk memastikan prinsip tepat sasaran, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran strategis dalam mengelola dan memanfaatkan DTSEN sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan DTSEN tidak hanya menuntut ketersediaan data, tetapi juga mencakup aspek koordinasi antarinstansi, mekanisme pemutakhiran data, partisipasi masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pendukung.

Penyelenggaraan pengentasan kemiskinan harus komprehensif, mempertimbangkan berbagai sudut pandang kehidupan, didiskusikan secara menyeluruh, dan dilakukan secara metodis (Papilaya 2020:77)

Pada tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Pasal 1) bahwa yang dimaksud dengan:

1. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4. Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.

5. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
6. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
7. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, 2021).

Proses usulan data disampaikan melalui Dinas Sosial daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota setelah dilakukan musyawarah desa/kelurahan. Data usulan di atas kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial, dan hasilnya selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri. Saran Pengiriman Data dikirimkan melalui aplikasi SIKS-NG. Kementerian Lembaga terkait, khususnya untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga telah ditetapkan aturan pendataan rumah tangga kurang mampu (Azmi 2021).

Pengelolaan DTSEN berpedoman pada peraturan saat ini yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021. Karena Data yang ditangani oleh dinas sosial, banyak masyarakat yang mengalami kendala akibat data ganda

dan keluarga yang bisa menerima bantuan, namun ada juga masyarakat umum yang layak menerima bantuan tetapi tidak bisa menerima bantuan untuk menerimanya.

Dalam uraian Latar Belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini yang dapat penulis ambil yaitu data yang tidak sinkron antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan, nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga bantuan sosial tidak tepat pada sasarannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah tentang bagaimana **"Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Di Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait didalamnya, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu baru terkait Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mewujudkan data yang lebih berkualitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi Instansi Terkait dalam kegiatan merumuskan kebijakan kedepannya, untuk melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mewujudkan data yang lebih berkualitas.

1.4.2.2 Masyarakat Umum, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu tentang pemanfaatan DTSEN untuk menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah *Universal Application*. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya umat manusia dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substantial ia adalah sama.

Unsur-unsur administrasi pasti ada, sekalipun ia berada di masyarakat primitive. Ia akan bertambah canggih Bersama dengan bertambah maju dan kompleksnya masyarakat. Administrasi muncul karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Manusia menyadari akan nilai kerja sama dari suatu kenyataan bahwa hanya dengan melalui kegiatan kolektif lah ia dapat memperoleh sesuatu yang tak dapat ia capai seorang diri.

Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga disusun, digerakkan, dan dikemudikan (S. Anggara 2012).

Kemajuan teknologi telah memaksa secara imperative diadakannya pembagian kerja dan secara substantial telah meredusir pentingnya kemampuan individual di dalam organisasi. Metode pembagian kerja antar anggota ini didasarkan atas perbedaan kemampuannya yang disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Hasilnya adalah penggunaan kemampuan yang sangat efisien serta akan mengarah kepada spesialisasi keahlian.

Selanjutnya Dimock dalam (Anggara 2012:144) menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya. Sejalan dengan pendapat di atas Thoha dalam (Anggara 2012:147) mengemukakan ilmu administrasi negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik.

Kerja sama menurut adanya pembagian kerja di antara anggotanya. Pembagian kerja ini diperlukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, seperti ketidakmampuan individu untuk berada di dua tempat ada waktu yang bersamaan, ketidakmampuan untuk menguasai berbagai macam pengetahuan dan skill, serta ketidakmampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas secara sempurna. Kesemuanya Kesemuanya itu disebabkan oleh perbedaan skill, sifat, dan kapasitas individu.

Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain. Agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, administrasi dituntut untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Ini meliputi keteraturan aktivitas yang dilaksanakan, penyedia dan penggunaan sumber manusiawi dan material secara kebijaksana, pengurangan pemborosan dan inefisiensi, ekonomis di dalam operasi, kesejahteraan pegawai, kepuasan langganan, pemecahan masalah secara cepat dan lainlain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat (Ekowanti, H., & Tamrin 2022:7-8).

Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa) (Hiplunudin 2021:22).. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya (Sahya Anggara 2016) .

Menurut Suwarno dalam (Afifudin. 2015) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila diperlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerical work*) jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Menurut Atmosudirjo dalam (Ngusmanto. 2015) administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam sesuatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suminta dalam (Pasolong 2016:13) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi publik maupun organisasi bisnis.

2.1.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikta publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang

dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Engkus. 2022).

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018).

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Uddin, 2017:8).

Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik actor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara”. Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku *Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D. adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (Uddin, 2017:9).

Menurut Said Zainal Abidin, alumni *University of Pittsburgh*, Pennsylvania, US, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya (Uddin, 2017:10).

Menurut Nugroho dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017:10) Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga; bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Akan tetapi, dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017:10), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

- (1) Efektifitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasikan tujuan akhir yang diinginkan.
- (2) Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- (3) Cukup, suatu kebijakan dapat mencari hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- (4) Adil, bersikap seimbang, objektif, dan tidak diskriminatif dalam memperlakukan orang lain.

- (5) Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Adapun beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli yang dikutip dalam buku Kebijakan Publik (Uddin, 2017:34-35) diantaranya:

- (1) Irfan Islamy

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

- (2) Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan.

- (3) George C. Edwards III & Ira Sharkansky

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

- (4) W.I. Jenkins

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seseorang actor politik atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor politik atau sekelompok actor politik.

(5) James E. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

(6) Chief J.O. Udoji

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga Masyarakat.

2.1.2.1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menurut (Dye, 1995) merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif. Kewenangan otoritatif pemerintah itulah yang berdampak pada adanya produk kebijakan publik yang justru terlahir bukan untuk kepentingan publik semata, namun terkadang hanya untuk legitimasi kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

Menurut William N. Dunn, formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan berbagai alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Formulasi kebijakan melibatkan analisis biaya-manfaat, prediksi dampak, serta penggunaan berbagai metode evaluasi agar kebijakan yang dirumuskan dapat menghasilkan hasil terbaik (Dunn, 2017:91). Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tidak hanya sekadar membuat alternatif, tetapi juga menilai konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan. Thomas R. Dye juga

menegaskan bahwa formulasi kebijakan adalah tahap ketika pemerintah mempertimbangkan dan memilih solusi terbaik sebelum ditetapkan sebagai kebijakan final.

Wayne Parsons memandang formulasi kebijakan sebagai proses politis dan teknis dalam memilih solusi kebijakan terbaik dari berbagai opsi yang tersedia (Parsons, 2005:112). Secara lebih awal, Formulasi kebijakan adalah proses intelektual untuk memilih tindakan pemerintah berdasarkan analisis ilmiah.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan adalah proses sistematis, rasional, dan politis dalam menyusun dan menentukan alternatif kebijakan terbaik sebagai langkah penyelesaian permasalahan publik.

2.1.2.2. Implementasi Kebijakan

Pengertian mengenai implementasi kebijakan publik sangat beragam. Anderson mengemukakan bahwa: *"Policy implementation is the application by government's administrative machinery to the problems"* (Pelaksanaan kebijakan adalah aplikasi oleh mesin/badan administrasi pemerintah terhadap masalah-masalah) . Kemudian Edward III menjelaskan bahwa: *"Policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects"* (pelaksanaan kebijakan adalah tahap pembuatan antara pembentukan sebuah kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan untuk orang-orang yang terpengaruh atas kebijaksanaan tersebut).

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah penerapan hasil perumusan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat atau orang-

orang yang terpengaruh atas kebijakan tersebut. Tahapan implementasi kebijakan dilakukan setelah tahap formulasi kebijakan publik. Dalam tahapan ini, apa-apa yang sudah dituliskan dalam formulasi akan diterapkan pada masyarakat luas. Tujuan dilaksanakan implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijiwijoto “implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”(Maranda. 2020:1).

Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut (Mulyadi, 2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- (1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- (3) Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- (4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- (5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- (6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Implementasi menurut teori (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Gordon (Mulyadi, 2015:24), menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (Syahida 2014:10) “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”

Sedangkan menurut Wahyu dalam (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana

atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Pressman dan Wildavsky (Syahida 2014) mengemukakan bahwa: *“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Menurut Syaukani dkk (Pratama 2015), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

2.1.2.3. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah proses sistematis untuk mengkaji suatu masalah publik dengan tujuan memberikan rekomendasi terbaik bagi pembuat kebijakan. Proses ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, efektif, dan berdasarkan data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis kebijakan membantu pemerintah memahami masalah, mempertimbangkan alternatif, serta memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan publik.

Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode ilmiah untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan kebijakan (Dunn, 2017b). “Analisis kebijakan adalah

disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penyelidikan untuk menghasilkan informasi penting bagi keputusan kebijakan.” Pendapat ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan berfungsi menyediakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan agar kebijakan dapat diformulasikan secara ilmiah.

Thomas R. Dye (2013: 1) menjelaskan bahwa analisis kebijakan bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, alasan pemerintah melakukan suatu tindakan, dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat (Ye, 2013:1). Analisis kebijakan adalah upaya mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, mengapa dilakukan, dan apa akibatnya. Makna tidak langsungnya yaitu analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi substansi tindakan pemerintah agar dapat dipahami dan dinilai efektivitasnya.

Analisis kebijakan dilakukan untuk mengkaji isi kebijakan, penyebab munculnya kebijakan, serta konsekuensinya terhadap masyarakat (Anderson 2014b). Anderson mengutip bahwa: “Analisis kebijakan adalah kajian sistematis terhadap isi kebijakan, sebab kemunculan kebijakan, dan dampaknya bagi publik.” Pernyataan ini menegaskan bahwa analisis kebijakan tidak hanya melihat kebijakan dari sisi isi, tetapi juga konteks pembentukannya serta implikasinya.

Analisis kebijakan merupakan proses yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kepentingan politik dalam memilih solusi kebijakan terbaik (Parsons 2005b). Parsons secara langsung menyatakan: “Analisis kebijakan adalah proses yang menyatukan pengetahuan ilmiah dan pertimbangan politik untuk

menghasilkan keputusan kebijakan yang lebih baik.” Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan tidak hanya teknis, tetapi juga berkaitan dengan strategi dan dinamika politik.

2.1.3. Teori Manajemen Kebijakan Publik

Teori ini mengamati bagaimana perangkat dan sistem digital, seperti internet, media sosial, dan aplikasi, mengubah cara kita berinteraksi, belajar, bekerja, dan berbisnis. Tidak mungkin memisahkan manajemen dari proses pencapaian tujuan organisasi korporat. Tentu saja, kerja sama di dalam perusahaan terjadi selama proses tersebut. Dalam hal ini, manajemen berhasil memotivasi dan mengarahkan tim individu menuju tujuan bersama. Sehingga begitu, Manajemen juga diperlukan dalam proses kebijakan publik untuk memastikan bahwa rencana dapat dilaksanakan dengan tepat untuk mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen disebut dengan manajemen yaitu to manager yang artinya mengelola, Maksudnya pengelolaan adalah terciptanya suatu masalah, prosesnya, siapa dan apa yang mengelola, mengapa pengelolaan perlu dilakukan, dan apa tujuan pengelolaan tersebut. Selain itu, pengelolaan proses memastikan penggunaan semua fasilitas dan alat sumber daya secara efektif dan efisien (Candra, A., & Rifa'i 2016).

Berikut 4 fungsi manajemen menurut Megawati & Ruyatnasih (2018) yang akan peneliti uraikan di bawah ini ialah:

- 1) *Planning* (perencanaan) Perencanaan merupakan proses untuk menentukan siapa dan bagaimana suatu bisnis tertentu dijalankan. Mulai dari menentukan naskah, garis besar, dan program yang akan dijalankan pada data mendatang. Sebelum

setiap proses dilakukan, perencanaan juga disebut sebagai proses yang paling penting. Pemerintah akan melalui proses perencanaan dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah dengan baik serta kebijakan atau program yang akan dijalankan. Dapat memberikan pedoman atau dasar acuan dalam mencapai tujuan. Perencanaan juga mencakup banyak hal positif, termasuk langkah-langkah yang akan diambil hingga proses anggaran selesai sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

2) *Organizing* (pengorganisasian) Pengorganisasian merupakan suatu proses menempatkan sumber daya yang ada ditambah dengan keahliannya, terutama laporan pembagian kerja dan batas-batas kerja, serta menetapkan hubungan sebagaimana unsur-unsur yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai. Apabila manusia yang tepat adalah sumber daya yang baik dalam pelaksanaan segala program pemerintah. Hal ini karena tenaga kerja yang terlatih dapat memudahkan kerja sama tim dalam mencapai tujuan. Apa pun yang terjadi, hal ini mencakup: martabat manusia, saling pengertian, tujuan kerja yang jelas, dan kerja sama tim yang kuat.

3) Implementasi (pelaksanaan) Implementasi merupakan proses mencocokkan setiap elemen yang ada dengan apa yang telah ditentukan pada tahap awal/akhir. Tugas merupakan hal yang cukup penting karena setiap usaha harus dimulai agar setiap hari dapat mencapai tujuan yang ada.

4) Evaluasi (menilai) Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui bagaimana suatu kegiatan atau program tertentu dilaksanakan. Dalam evaluasi, apabila terdapat bukti ketidakpatuhan dapat ditinjau ulang atau diperbaiki agar proses dapat berjalan sesuai rencana. Pastikan setiap upaya yang dilakukan dilakukan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga fungsi di atas berpotensi mencapai efektivitas operasional dalam suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Apabila salah satu fungsi tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan karena kurang berkaitan dengan fungsi lainnya.

2.1.4. Teori Good Government

Konsep *Good Government* muncul sebagai bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan. Menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP, 2009:3), pemerintahan yang baik adalah suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang didasarkan pada prinsip partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (UNESCAP. 2009).

Pendapat ini sejalan dengan pandangan *United Nations Development Programme* (Programme. 1997b) yang menyebutkan bahwa *Good Governance* mencakup tiga pilar utama, yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*), yang bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh unsur masyarakat.

Menurut (Grindle 2010) dalam karyanya *Good Governance: The Inflation of an Idea*, konsep pemerintahan yang baik mencakup tata kelola institusi publik

yang adil, transparan, akuntabel, partisipatif, serta mampu mengelola sumber daya publik secara efisien. Grindle menekankan bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya menuntut idealisme moral, tetapi juga menyesuaikan dengan kapasitas institusional suatu negara atau daerah.

Sementara itu, (Stowe 1992) dalam bukunya *Good Government The Normative Dimension of Politics* menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya kebebasan politik, perlindungan hak konstitusional, independensi peradilan, stabilitas ekonomi, pembangunan sosial melalui pendidikan dan kesehatan, serta akuntabilitas lembaga eksekutif kepada badan legislatif yang dipilih secara demokratis. Stowe menegaskan bahwa esensi *good government* adalah keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut (Sedarmayanti. 2009) dalam bukunya *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, *good governance* berarti penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta menjaga kesinergisan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baik harus berpijak pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan hukum yang tegas agar mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

(Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2000) dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan *Good Governance* di Indonesia juga menyatakan bahwa *Good Governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip

demokrasi, efisiensi pasar, pencegahan korupsi, serta supremasi hukum yang menjamin kebebasan politik dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, teori *Good Government* pada dasarnya menekankan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya publik dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Pemerintahan yang demikian diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta mengurangi praktik-praktik korupsi dan ketidakadilan sosial.

2.1.5. Teori Good Governance

Teori *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah konsep dalam ilmu politik, administrasi publik, dan manajemen pembangunan yang merujuk pada cara-cara pemerintah menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara adil dan efektif. *Good governance* adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan serta penegakan hukum.

Teori *Good Governance* adalah konsep pemerintahan yang baik dan efisien, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara bersama oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta.

Menurut Sedarmayanti (2018), *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang menekankan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan sumber daya. Prinsip-prinsip *good governance* menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jujur, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan negara.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan dan program yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik guna menjamin bahwa kebijakan sesuai dengan kebutuhan publik.

5. Efisiensi

Efisiensi berarti penggunaan sumber daya publik secara optimal untuk

memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin.

Menurut Hardiyansyah (2018), good governance harus dibangun melalui keterlibatan warga (civic engagement), di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik.

1. Responsivitas

Kemampuan penyelenggara pelayanan publik untuk mengenali, memahami, dan menanggapi kebutuhan serta keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai harapan masyarakat..

2. Akuntabilitas

Diperlukan agar tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, maupun hukum kepada publik.

3. Kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan publik

Di mana seluruh warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

4. Kualitas pelayanan publik

Yang berarti pemerintah harus mampu menyediakan layanan yang efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Sinambela (2019) good governance dimulai dari prinsip legitimasi, yaitu bahwa pemerintahan mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil dianggap sah dan diterima publik.

Berikut ini prinsip-prinsip good governancenya :

1. Efektivitas

Pemerintahan harus mampu mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik secara nyata dan terukur.

2. Efisiensi

Pemanfaatan sumber daya secara optimal agar tidak terjadi pemborosan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

3. Keadilan

Di mana kebijakan pemerintah harus memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

4. Pengendalian eksternal

Adanya mekanisme kontrol dari masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga independen untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik.

Menurut (Agoes 2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut (Tjokroamidjojo 1990) terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki.

Good Governance berkembang sebagai respon terhadap perubahan paradigma pemerintahan dari sistem yang bersifat *government-centered* menjadi *governance-centered*, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pembangunan.

Menurut (Programme. 1997a), *Good Governance* adalah suatu hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. UNDP menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci tercapainya pembangunan manusia yang berkelanjutan. *Good Governance* Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mewujudkan kesejahteraan publik.

2.1.5.1. Tata Kelola Bantuan Sosial

Tata kelola bantuan sosial merupakan suatu proses pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan serta program bantuan sosial agar pelaksanaan distribusi bantuan dapat mencapai tujuan

kesejahteraan masyarakat secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial, tata kelola bantuan sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penyaluran, pemanfaatan, pengawasan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran dan sesuai regulasi untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat (Permensos No. 3 Tahun 2021: Pasal 1).

Secara teoritis, tata kelola bantuan sosial juga dipahami sebagai bentuk *public governance* dalam sektor perlindungan sosial, di mana pemerintah menjalankan fungsi regulatif dan distributif melalui program bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan daya tahan ekonomi, serta menjamin hak dasar warga negara dalam aspek sosial dan ekonomi dalam buku *Administrasi Kebijakan Sosial*, bahwa tata kelola bantuan sosial merupakan mekanisme intervensi pemerintah dalam bentuk distribusi sumber daya publik yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan, data terpadu, dan sistem koordinasi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan adanya jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan (Salim 2019).

Teori tata kelola bantuan sosial dapat dikaitkan dengan teori Good Governance, di mana tata kelola bantuan sosial harus memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, serta supremasi hukum. Tata kelola bantuan sosial yang baik hanya dapat berjalan apabila terdapat kejelasan aturan, pemanfaatan data yang valid, serta mekanisme pengawasan yang mencegah

penyalahgunaan, politik balas budi, dan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat (Programme. 2009b).

Selain itu, teori Kebijakan Publik dalam *Public Policy Analysis* relevan dalam tata kelola bantuan sosial, di mana ia menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial harus melalui tahapan formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi agar kebijakan benar-benar berdampak pada kelompok sasaran serta mencegah kesalahan administrasi, duplikasi data, dan ketidakadilan dalam distribusi bantuan (Dunn, 2018:79).

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui sistem perlindungan sosial termasuk bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola bantuan sosial bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga kewajiban negara dalam pemenuhan hak sosial warganya (Esping-Andersen, 1990).

2.1.5.2. Tata Kelola Bansos Sembako

Tata kelola Bansos Sembako adalah suatu rangkaian proses pengelolaan bantuan sosial berupa kebutuhan pangan pokok yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau rentan miskin yang mencakup tahapan perencanaan, pendataan penerima, penyaluran, pemantauan, dan evaluasi agar bantuan dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta sesuai dengan standar pelayanan publik.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Sembako, tata kelola Bansos Sembako merupakan mekanisme sistematis yang terdiri atas pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penetapan

penerima manfaat, penyaluran melalui bank penyalur atau agen e-warong, serta pengawasan dan pelaporan guna menjamin akuntabilitas serta efektivitas program (Permensos No. 5 Tahun 2021: Pasal 2–4).

Secara akademis, tata kelola Bansos Sembako juga diartikan sebagai instrumen kebijakan publik di bidang perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi angka kemiskinan, serta meminimalkan kerentanan sosial masyarakat berpenghasilan rendah. Tata kelola Bansos Sembako merupakan bentuk intervensi negara melalui sistem subsidi pangan yang berorientasi pada keadilan distribusi dengan menggunakan prinsip transparansi, teknologi informasi, serta integrasi data nasional untuk menjamin distribusi bantuan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi penerima manfaat (Suparman, 2022)

Tata kelola Bansos Sembako dapat dikaitkan dengan teori Good Governance, di mana keberhasilan penyaluran bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Tata kelola bantuan pangan yang efektif hanya dapat dicapai ketika kebijakan dilaksanakan dengan standar etika publik, tata administrasi yang baik, serta mekanisme kontrol yang dapat mengurangi penyimpangan dan politisasi bantuan (UNESCAP, 2009). Dengan demikian, tata kelola Bansos Sembako mengharuskan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur, dan masyarakat penerima agar program dapat berjalan sesuai tujuan (Edwards 2014).

2.1.5.3. Tata Kelola Program Keluarga Harapan (PKH)

Tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu proses pengaturan, perencanaan, pendataan, penyaluran, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin dan rentan miskin, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Tata kelola PKH bukan hanya sekadar mekanisme distribusi bantuan uang tunai, tetapi merupakan strategi pemerintah dalam membangun perubahan perilaku sosial penerima manfaat melalui pendampingan, verifikasi komitmen, serta penguatan kapasitas keluarga agar mampu mandiri secara ekonomi (Adiwijaya, 2021).

Tata kelola PKH dapat dikaji melalui teori Good Governance, yang menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan program bantuan sosial harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, inklusivitas, dan kapasitas responsif lembaga pelaksana. Tata kelola program bantuan bersyarat seperti PKH harus memiliki sistem koordinasi lintas lembaga, mekanisme pelaporan yang akurat, serta proses pengawasan publik untuk mencegah penyimpangan dan memastikan keadilan sosial dalam penyaluran bantuan (Programme, 2009a) .

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi antar pihak pelaksana, sumber daya yang tersedia, karakteristik agen pelaksana, kondisi

sosial politik, serta sikap pelaksana kebijakan (Van Meter, D. S., & Van Horn 1975). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola PKH membutuhkan pendamping profesional, sistem data yang valid, dukungan kelembagaan, dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga penyalur.

2.1.5.4 Tata Kelola Bantuan Sosial YAPI (Yatim Piatu)

Tata kelola bantuan sosial YAPI (Yatim Piatu) adalah suatu proses pengelolaan bantuan yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan piatu melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta didukung dengan pengawasan yang efektif. Tata kelola ini mencakup tahapan perencanaan, pendataan, penyaluran, monitoring, hingga evaluasi agar program bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penerima manfaat. Tata kelola bantuan sosial merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan secara adil, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kontrol yang sistematis (Mulyadi, 2016).

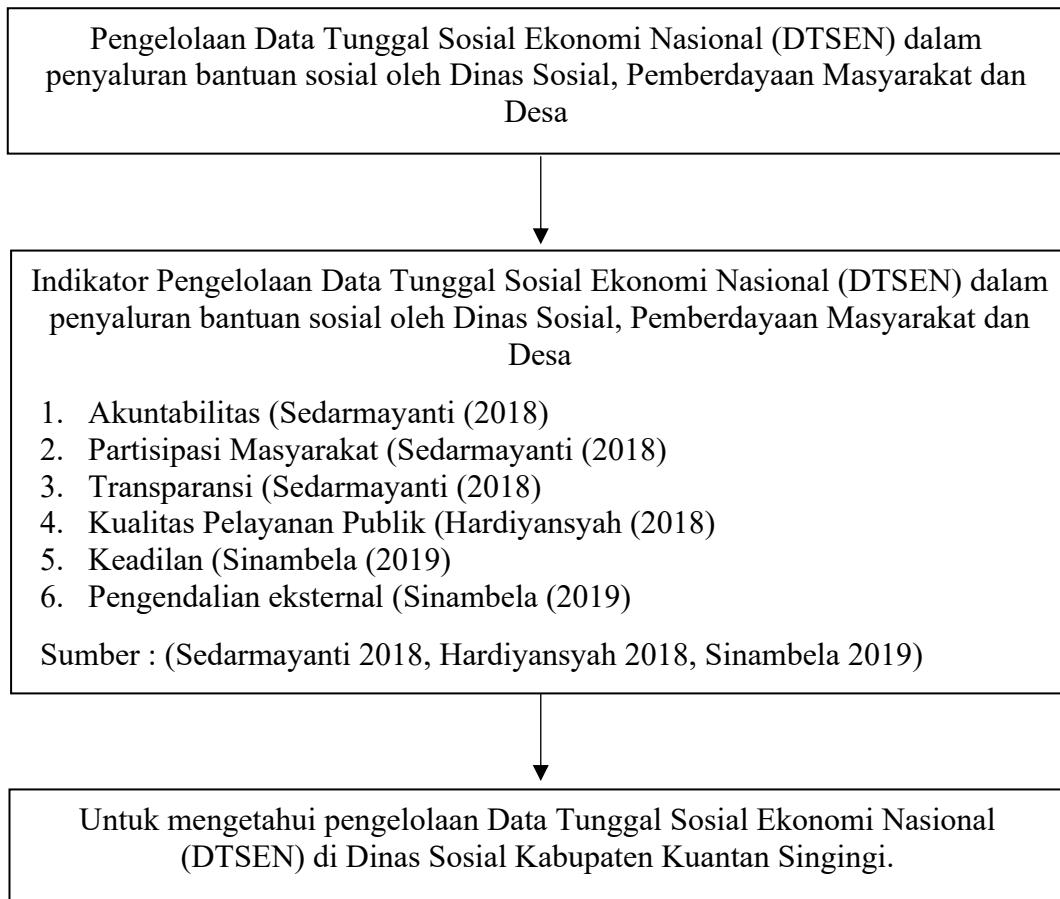
Pengelolaan bantuan sosial yang baik harus mengacu pada prinsip governance seperti transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan (Sedarmayanti, 2017). Bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti yatim piatu memerlukan sistem tata kelola yang terarah, terstandar, dan terukur untuk memastikan keberlangsungan serta peningkatan kualitas hidup penerima. Tata kelola bantuan sosial harus mencakup identifikasi kebutuhan, mekanisme pendataan, distribusi, monitoring dan evaluasi sebagai bentuk penjaminan mutu serta keberhasilan kebijakan (Nugroho 2020:138).

Tabel 2.1. Indikator Tata Kelola Menurut Para Ahli

No.	Sedarmayanti (2018)	Hardiyansyah (2018)	Sinambela (2019)
1.	Transparansi	Responsivitas	Efektivitas
2.	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Efisien
3.	Efektivitas	Kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan publik	Keadilan
4.	Partisipasi Masyarakat	Kualitas Pelayanan Publik	Pengendalian eksternal
5.	Efisiensi		

2.2 Kerangka Pemikiran

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis dari Penelitian ini yaitu apabila Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini di laksanakan dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apabila Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini tidak di laksanakan dengan baik maka kesejahteraan akan menurun . Dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian dari indikator yang telah disebutkan seperti :

2.4.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data sosial ekonomi dilakukan secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas ini dimulai dari tahap pendataan di lapangan yang harus mengikuti prosedur standar, sehingga informasi yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi warga. Proses verifikasi pun dilakukan berlapis melalui pemerintah daerah, perangkat desa/kelurahan, hingga masyarakat, agar data yang masuk ke sistem benar-benar akurat dan tidak menimbulkan kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan.

2.4.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa data sosial ekonomi yang dihimpun pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Masyarakat berperan sejak tahap awal pendataan dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kenyataan kepada petugas pendata. Setelah proses pendataan, masyarakat juga terlibat dalam tahap verifikasi melalui forum musyawarah data di tingkat RT/RW, desa, atau kelurahan untuk menilai apakah data yang tercatat sudah sesuai atau perlu diperbaiki.

2.4.3 Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) berarti bahwa seluruh proses pendataan, verifikasi, pemutakhiran, hingga pemanfaatan data dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga penyalur bantuan, serta masyarakat. Transparansi memastikan bahwa prosedur pengumpulan data mengikuti standar yang dapat dipahami publik, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana data mereka dihimpun dan digunakan. Selain itu, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melihat status data mereka, memberikan koreksi apabila terjadi kesalahan, serta memantau siapa saja yang tercantum sebagai penerima manfaat program sosial.

2.4.4 Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik berkaitan dengan bagaimana Dinas Sosial menggunakan DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar layanan yang diberikan lebih tepat sasaran, efisien, dan akurat. DTSEN berfungsi sebagai basis data penerima manfaat yang valid dan terintegrasi sehingga dapat mengurangi permasalahan seperti data ganda, penerima fiktif, ketidaktepatan sasaran, serta keluhan masyarakat akibat ketidakjelasan informasi. Kualitas pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial melalui DTSEN juga mencakup kemampuan Dinas Sosial dalam menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait kriteria penerima, prosedur pengajuan, waktu penyaluran, serta mekanisme pengaduan.

2.4.5 Keadilan

Keadilan dalam Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi merupakan prinsip utama yang memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi kriteria memperoleh hak yang sama dalam akses dan penerimaan bantuan sosial tanpa adanya diskriminasi maupun perlakuan yang tidak setara. Prinsip keadilan ini menekankan bahwa bantuan sosial harus diberikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga, bukan berdasarkan hubungan personal, kepentingan tertentu, atau faktor nonobjektif lainnya.

2.4.6 Pengendalian Eksternal

Pengendalian eksternal dalam Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar institusi pelaksana untuk memastikan bahwa proses pengelolaan data serta penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Pengendalian eksternal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik oleh lembaga formal maupun nonformal. Secara formal, pengawasan dilakukan oleh lembaga seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman Republik Indonesia, DPRD, serta Kementerian Sosial sebagai pembuat kebijakan nasional terkait DTSEN.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi	Strategi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi	Akuntabilitas	1. Pendataan sesuai prosedur 2. Ketepatan sasaran penerima
		Partisipasi Masyarakat	1. Pemberian data yang benar 2. Keterlibatan dalam musyawarah data
		Transparansi	1. Prosedur dan kriteria penerima dapat diakses 2. Akses informasi hasil pendataan
		Kualitas Pelayanan Publik	1. Ketepatan waktu pemuktahiran data DTSEN 2. Keakuratan pencatatan dan verifikasi data penerima
		Keadilan	1. Proses verifikasi berjalan sama untuk semua warga 2. Bantuan diterima sesuai kebutuhan sosial ekonomi
		Pengendalian eksternal	1. Keterlibatan desa/kelurahan dalam musyawarah data 2. Evaluasi rutin dari pengawas eksternal

Sumber: Sedarmayanti 2018, Hardiyansyah 2018, Sinambela 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptif menggunakan analisa dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus (Moleong, 2017:6).

3.2. Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek suatu penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Pegawai di Dinas sosial, pegawai kelurahan dan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 8 orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Informan

No	Unsur Informan	Jumlah	
		Key Informan	Persentase
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial	1	10%
2	Operator SIKS-NG Bantuan Sosial	1	10%
4	Masyarakat	8	80%
Jumlah		10	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

3.3. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan (Sujarweni, 2018:3).

3.3.1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian (Sugiyono, 2018:256).

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, jurnal, artikel, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data (Sujarweni 2018:6).

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan desa, Komplek Perkantoran di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Pengamatan (observasi)

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena tersebut (Gunawan, 2015:143).

Menurut Arikunto, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik penelitian kualitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

3.6.2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019).

3.6.3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, yang berarti mengejar. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menumental seseorang (Sugiyono. 2014:240).

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Data yang diperoleh dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

3.7.1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Yaitu pengumpulan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2 Reduksi Data (*data reduction*)

Yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.3. Penyajian Data (*data display*)

Yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.7.4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Yaitu dalam pengumpulan data dan tanggap terhadap suatu yang diteliti langsung di lapangan dengan penyusunan pola-pola pengarah dan sebab akibat.

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan /Minggu																							
		Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Mei 2026				Juni 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			√																					
2	Pengeluaran Surat Keputusan					√																			
3	Persiapan Penyusunan Proposal						√	√	√																
4	Bimbingan Proposal									√	√	√													
5	Seminar Proposal												√												
6	Revisi Proposal													√	√										
7	Skripsi																	√	√	√	√	√	√	√	

Sumber: Modifikasi Penelitian 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten baru di Provinsi Riau dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Adapun luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7.656,03 km² dengan jumlah penduduk 314.276 jiwa (Data BPS Tahun 2015). Kabupaten Kuantan Singingi terbentuk pada 12 Oktober 1999 dengan Ibu Kota Teluk Kuantan dengan Motto Daerah BASATU NAGORI MAJU. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 218 Desa.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kuantan Singingi adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan program dan kegiatan sosial, serta pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mewujudkan visi “Kuantan Singingi Negeri Bermarwah” Di Riau. Dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa ini terbentuk pada 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa berfungsi sebagai bagian integral dari pemerintahan kabupaten kuantan singingi untuk mencapai tujuan tersebut, sejalan dengan misi-misi kuantan singingi.

Dinas ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam berbagai kegiatan dan program sosial yang bertujuan untuk mencapai visi kabupaten kuantan singingi, yaitu terwujudnya masyarakat yang berbudaya , religius, maju, berwawasan, sejahtera, dan dan harmonis.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam berbagai kegiatan dan program sosial dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Kuantan Singingi. Sejalan dengan hal tersebut, visi kabupaten kuantan singini adalah;

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut :

1. BERBUDAYA mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.
2. RELIGIUS mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajarang agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagama dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi control pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

3. MAJU mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastuktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan.
4. BERWAWASAN mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima.
5. SEJAHTERA mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

6. HARMONIS mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan visi Dinas Sosial tersebut, perlu kiranya di rumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus di tuntaskan oleh organisasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Sosial serta mengetahui peran dan program-programnya bahkan termasuk hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Adapun Misi Dinas Sosial PMD Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- 1) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermatabat.
- 2) Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis.
- 3) Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing.
- 4) Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sector unggulan daerah.

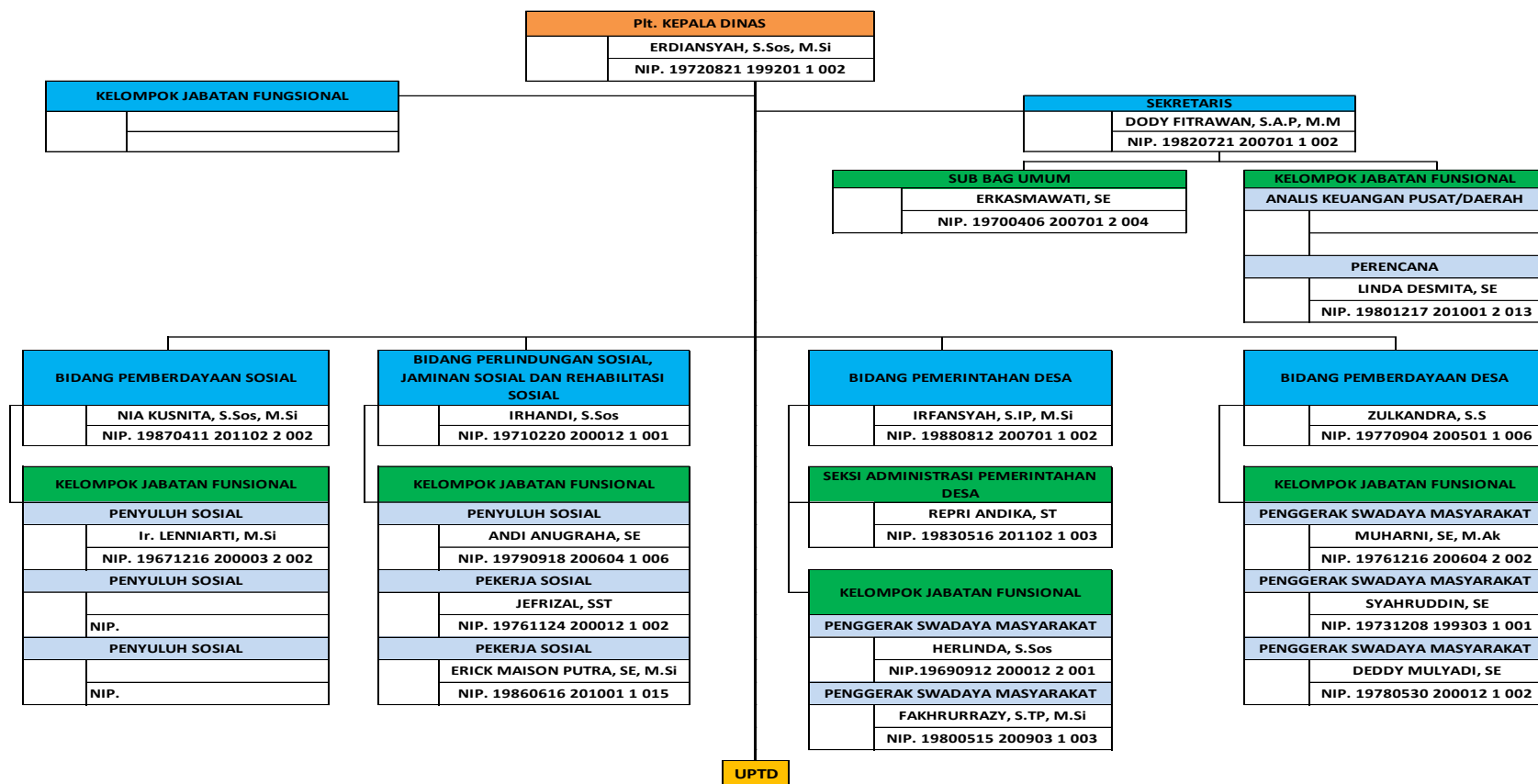
- 5) Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembanguna kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

4.2 Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. (Malayu S.P Hasibuan, 2015: 120).

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan struktur organisasi diatas pada gambar diatas, maka dapat dilihat bahwa posisi Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, dan merupakan pejabat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam melakukan aktivitas kedinasan. Dan dapat dilihat dibawah Kepala Dinas terdapat Sekretaris dan beberapa Kepala Bagian lainnya yang membantu kepala Dinas dalam melakukan aktivitas kedinasan sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

A. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum;
- c) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Subbagian Umum;
- d) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;

- e) Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- f) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- g) Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- h) Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- i) Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- j) Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- k) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- l) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- m) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- n) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- o) Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- p) Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- q) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum; dan
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- s) Menyusun rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. Subkoordinator Jabatan Fungsional Substansi Keuangan

Subkoordinator Jabatan Fungsional Substansi Keuangan mempunyai tugas :

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi keuangan;
- c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi keuangan;
- d) Mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan pada dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) Melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f) Mengelola keuangan dan penyiapan gaji pegawai;
- g) Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
- h) Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemuktahiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan para substansi keuangan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subkoordinator Jabatan Fungsional Substansi Program

Subkoordinator Jabatan Fungsional Substansi Program mempunyai tugas

- a) Merencanakan program/kegiatan dari penganggaran pada substansi program;
- b) Melaksanakan inventarisasi data dari informasi substansi program

- c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi program;
- d) Mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, menganalisa, menyajikan dan menginformasikan data bidang Sekretariat Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e) Melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f) Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;
- g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Program; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Sosial;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pemberdayaan desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencan operasional pada bidang pemberdayaan desa;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan desa;
 - c. Penyiapan perumusan dan pelaksaasn kebijakan teknis di bidang perberdayaan sosial
 - d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perberdayaan desa;
 - e. Pelaksaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Dan Rehabilitas Sosial

- (1) Kepala Bidang Perlindungan, jaminas dan rehabilitas sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitas sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitas sosial;
 - b. Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitaa sosial;
 - c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitas sosial;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang jaminan social, bencana dan rehabilitas social;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas kepala bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

B.Wewenang Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- (1) Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sosial

1. Pemberdayaan Sosial Komonitas Adat Terpencil (KAT) ;
2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten ;
3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten;
4. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten;

5. Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
6. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan human *immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
7. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
8. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
9. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
10. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
11. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
2. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
3. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
4. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;

5. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
 6. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.
- (3) Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DTSEN sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pendataan, pemanfaatan data, serta keterlibatan masyarakat yang sudah berjalan, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat secara merata, keterbatasan pemahaman informasi, keterlambatan pemutakhiran data, serta belum optimalnya pengendalian eksternal dan evaluasi rutin.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi, maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Sosial meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan agar proses pendataan dan musyawarah dapat berjalan lebih efektif dan objektif.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kriteria dan mekanisme DTSEN agar masyarakat lebih memahami dan aktif berpartisipasi.
3. Melakukan pemutakhiran data secara berkala dan tepat waktu agar data yang digunakan selalu akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

4. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi rutin oleh pihak eksternal agar proses pengelolaan DTSEN lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
5. Pemerintah daerah dan Dinas Sosial perlu meningkatkan kapasitas operator desa/kelurahan melalui pelatihan rutin agar penginputan dan verifikasi data lebih akurat dan seragam.
6. Perlu adanya sistem digital yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat untuk meningkatkan transparansi serta meminimalisir kesalahan data.
7. Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sosial agar potensi ketidaktepatan sasaran bantuan dapat diminimalisir sejak awal.
8. Pemerintah juga disarankan membentuk mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih responsif agar setiap ketidaksesuaian data atau bantuan dapat segera ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, A, Safi, M., & Abdullah, R. 2018. *Dasar-dasar Pengolahan Data untuk Penelitian*. arg. Alfabeta. Bandung.
- Adiwijaya. 2021. *Manajemen kebijakan perlindungan sosial*. arg. Prenada Media Group. Jakarta.
- Afifudin. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi*. arg. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agus, H. (2021). *Administrasi Negara: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Konteks Negara Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Agoes, S. 2013. *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik (Edisi 4)*. arg. Salemba Empat. Jakarta.
- Anderson, J. E. 2014a. *Public Policymaking*. arg. Cengage Learning. Boston.
- Anderson, J. E. 2014b. *Public policymaking (8th ed.)*. arg. Cengage Learning. Boston.
- Anggara, S. 2012. *Administrasi Negara*. arg. Pustaka Setia. Bandung.
- Anggara, Sahya. 2016. *Cv Pustaka Setia Ilmu Adminsitasi Negara*.
- Azmi, M. 2021. *Kebijakan Pendataan dan Validasi Data Sosial Ekonomi Masyarakat*. arg. Kementerian Sosial RI. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta.
- Bovaird, T., & Löffler, E. 2003. *Public management and governance*. arg. Routledge. London.
- Candra, A., & Rifa'i, M. 2016. *Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi*. arg. Deepublish. Yogyakarta.
- Davis, G. B. (1991). *Introduction to Information Systems: A Managerial End User Perspective*. New York: McGraw-Hill.
- Dunn, W. N. 2017a. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. arg. Routledge. New York.
- Dunn, W.N. 2017b. *Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.)*. arg. Routledge. New York.
- Dunn, W.N. 2018. *Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.)*. arg. Routledge. New York.
- Dye, T. R. 1995. *Understanding Public Policy*. arg. Prentice Hall. New Jersey.
- Edwards, G. C. III. 2014. *Implementing public policy*. arg. Pearson. Boston.
- Ekowanti, H., & Tamrin, A. 2022. *Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan*. arg. Andi Offset. Yogyakarta.

- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. arg. Alfabeta. Bandung.
- Esping-Andersen, G. 1990. *The three worlds of welfare capitalism*. arg. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.
- Fauzan. (2022). *Manajemen Bantuan Sosial dan Perlindungan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Fujiyati, K., & Sukadi. 2015. *Pengantar Teknologi Informasi*. arg. Andi. Yogyakarta.
- Grindle, M. S. 2010. *Good governance: The inflation of an idea*. Cambridge. arg. Harvard University Press. Cambridge.
- Gunawan, I. 2015. *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. arg. Bumi Aksara. Jakarta.
- Herdiana, D. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan*. arg. Pustaka Setia. Bandung.
- Hiplunudin, A. 2021. *Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. arg. Kencana. Jakarta.
- Hogwood, B. & Gunn, L. (1982). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Howlett, M. & Ramesh, M. (2003). *Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, C.O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. USA: Brooks/Cole.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Tunggal Ekonomi Nasional*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kumorotomo, W., & Margono, S. A. (2004). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurnianto, A., & Lukman, H. 2021. *Pengantar Sistem Pengolahan Data dan Informasi*. arg. Rajawali Pers. Jakarta.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2006). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (10th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2006). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (10th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2000. *Pedoman umum Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2000). Pedoman umum penyelenggaraan good governance di Indonesia. Jakarta: LANm penyelenggaraan good governance di Indonesia. arg. LAN RI. Jakarta.*
- Maranda. 2020. *Implementasi kebijakan publik. arg. CV Andi Offset. Yogyakarta.*
- Megawati, T., & Ruyatnasih, E. (2018). *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.*
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.*
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: Elex Media.*
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. *The policy implementation process. arg. Lexington Books. Lexington, Massachusetts.*
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif. arg. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.*
- Mulyadi. 2016. *Sistem akuntansi. arg. Salemba Empat. Jakarta.*
- Mulyadi, D. 2015. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik. arg. Alfabeta. Bandung.*
- Napisman. 2020. *Penyaluran Bantuan Sosial Melalui PT Pos Indonesia Mulai Dilakukan. arg. Riau Pos.*
- Ngusmanto. 2015. *Pengantar Administrasi Publik. arg. Andi Offset. Yogyakarta.*
- Nugroho, R. 2020. *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi. arg. Elex Media Komputindo. Jakarta=.*
- Nurhadi. 2021. *Evaluasi Data Penerima Bantuan Sosial di Indonesia. arg. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.*
- Papilaya, R. 2020. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kebijakan Publik. arg. Bumi Aksara. Jakarta.*
- Parsons, W. 2005a. *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis. arg. Edward Elgar Publishing.*
- Pasolong, H. 2016. *Teori Administrasi Publik. arg. Alfabeta. Bandung.*
- Pratama, B. A. 2015. *Kebijakan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis riset. arg. Alfabeta. Bandung.*
- Poerwandari, E. K. (2005). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: LPSP3 FISIP UI.*
- Programme., United Nations Development. 2009b. *UNDP strategy for civil society*

- and civic engagement.* arg. UNDP. New York.
- Rosenau, J. N. 1992. *Governance, order, and change in world politics.* arg. Cambridge University Press. Cambridge.
- Sahya, A. (2016). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen.* Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, A. 2019. *Administrasi kebijakan sosial.* arg. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah.* arg. Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti. 2017. *Good governance: Tata kelola pemerintahan yang baik.* arg. PT Refika Aditama. Bandung.
- Stowe, K. 1992. *Good government: The normative dimension of politics.* arg. Simon & Schuster. New York.
- Suharto, Edi. (2019). *Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial.* Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). *Sistem Informasi Manajemen.* Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* arg. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* arg. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2018. *Metodologi penelitian.* arg. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suparman. 2022. *Manajemen program bantuan sosial.* arg. Prenada Media Group. Jakarta.
- Syahida, J. 2014a. *Implementasi kebijakan publik.* arg. Alfabeta. Bandung.
- Syahida, J. 2014b. *Implementasi kebijakan publik.* arg. Alfabeta. Bandung.
- Tjokroamidjojo, B. 1990. *Good governance dan pembangunan.* arg. LP3ES. Jakarta.
- Uddin, S. 2017. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Implementasi.* arg. Kencana. Jakarta.
- UNESCAP., United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2009. *What is good governance?* arg. UNESCAP. Bangkok.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.* California: Sage Publications.
- Wulandari, S. (2022). *Administrasi Perlindungan Sosial.* Bandung: Alfabeta.
- Ye, T. R. 2013. *Understanding public policy (14th ed.).* arg. Pearson. New York.

Jurnal :

- Azmi, A. (2021). Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 45–53.
- Ilosa, R., Wahyuni, D., & Sari, M. (2023). *Evaluasi Pemutakhiran DTKS dalam Penanganan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(2), 101–115.
- Supriyanto, A. (2021). Evaluasi Sistem Pengelolaan DTKS pada Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(2), 56–68.
- Sutrisno, H. (2019). Teknik Pengumpulan Data Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial. *Jurnal Penelitian Sosial*, 7(1), 35–48.
- Widodo, J. (2017). Reformasi Administrasi Publik di Indonesia: Dinamika, Tantangan, dan Prospek. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 1–12.
- Winarno, B. (2012). Good Governance sebagai Prasyarat Kebijakan Publik yang Efektif. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 25–35.

Undang-undang:

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

**Judul : Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan
Singingi.**

Kepada : Masyarakat Penerima Bantuan Sosial

A. Identitas Peneliti

Nama	: Rahmiati
NPM	: 220411071
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

A. Identitas Responden

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Jabatan/Pekerjaan	:
Masa Kerja	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk Masyarakat penerima Bantuan Sosial

A. Akuntabilitas

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah proses pendataan DTSEN yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan prosedur yang jelas dan mudah dipahami?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah bantuan sosial yang Bapak/Ibu terima sudah sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ?

Berikan Ulasan

.....

B. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam memberikan data yang benar dan lengkap saat proses pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan atau diundang dalam musyawarah desa/kelurahan terkait pendataan atau validasi DTSEN? Jika ya, bagaimana keterlibatan tersebut?

Berikan Ulasan

.....

C. Transparansi

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui prosedur dan kriteria penerima bantuan sosial yang ditetapkan berdasarkan DTSEN? Dari mana informasi tersebut diperoleh?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah Bapak/Ibu dapat mengakses atau mengetahui hasil pendataan DTSEN yang mencantumkan status keluarga sebagai penerima atau bukan penerima bantuan sosial?

Berikan Ulasan

.....

D. Kualitas Pelayanan Publik

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan tepat waktu, terutama ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu terkait proses pencatatan dan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh petugas? Apakah data dicatat dengan teliti dan sesuai kondisi sebenarnya?

Berikan Ulasan

.....

E. Keadilan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah proses verifikasi DTSEN dilakukan secara adil dan sama bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang tertentu?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah bantuan sosial yang diterima Bapak/Ibu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi keluarga berdasarkan DTSEN?

Berikan Ulasan

.....

F. Pengendalian Eksternal

1. Apakah pemerintah desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam musyawarah terkait pendataan dan pengendalian DTSEN? Bagaimana bentuk keterlibatan tersebut?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya evaluasi atau pengawasan dari pihak luar (pengawas eksternal) terhadap pendataan DTSEN dan penyaluran bantuan sosial?

Berikan Ulasan

.....

Teluk Kuantan, 11 Februari 2026

Informan

(.....)

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

**Judul : Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan
Singingi.**

**Kepada : Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kuantan Singingi**

A. Identitas Peneliti

Nama	: Rahmiati
NPM	: 220411071
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

A. Identitas Responden

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Tingkat Pendidikan	:	
Usia	:	
Jabatan/Pekerjaan	:	
Masa Kerja	:	
Alamat	:	

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

A. Akuntabilitas

1. Bagaimana pelaksanaan pendataan DTSEN dilakukan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana DTSEN digunakan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak ?

Berikan Ulasan

.....

B. Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimana peran masyarakat dalam memberikan data yang benar pada proses pendataan DTSEN ?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa/kelurahan terkait penetapan dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ?

Berikan Ulasan

.....

C. Transparansi

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam membuka akses informasi terkait prosedur dan kriteria penerima bantuan sosial berbasis DTSEN ?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana Masyarakat dapat mengakses informasi hasil pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ?

Berikan Ulasan

.....

D. Kualitas Pelayanan Publik

1. Bagaimana ketepatan waktu pemuktahiran Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung penyaluran bantuan sosial?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana proses pencatatan dan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan untuk menjamin keakuratan data penerima bantuan ?

Berikan Ulasan

.....

E. Keadilan

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam proses verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi seluruh masyarakat?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana kesesuaian bantuan sosial yang diberikan dengan kondisi sosial ekonomi penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasioanal (DTSEN) ?

Berikan Ulasan

.....

F. Pengendalian Eksternal

1. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa/kelurahan dalam musyawarah data dan pengendalian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana pelaksanaan evaluasi rutin oleh pengawas eksternal terhadap pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ?

Berikan Ulasan

.....

Teluk Kuantan, 11 Februari 2026

Informan

(.....)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Informan I. Iwan Wahyudi, S.Kom Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



Informan II. Bapak Ramlan S.Sos.,M.si Selaku Operator SIKS-NG



Informan III. Ibu Endang Kadaryani Selaku Masyarakat



Informan IV. Ibu Gusneti Anggraini Selaku Masyarakat



Informan V. Ibu Indra Ningsih Selaku Masyarakat



Informan VI. Ibu Lila Wahyu Ningsih Selaku Masyarakat



Informan VII. Ibu Nurmaini Selaku Masyarakat



Informan VIII. Bapak Husin Selaku Masyarakat



Informan IX. Bapak Bambang Wijojo Selaku Masyarakat



Informan X. Ibu Windi Salvia Selaku Masyarakat



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 04/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
 NIDN : 1022018302
 Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
 NIDN : 1008128002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rahmiati
 NPM : 220411071
 Judul Skripsi : Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: uniksquantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 19 November 2025

Nomor : 101/FIS/UNIKS/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Permohonan Pra Riset**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Rahmiati
NPM	: 220411071
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi
Lokasi Penelitian	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


 DEKAN
 SARIAN M. S. Sos., M.Si
 IDN. 1008128002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>
 TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 226/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2025

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:101/FIS/UNIKS/XI/2025 Tanggal 20 November 2025.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	RAHMIATI
NIM	:	220411071
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSN) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
 Pada Tanggal : 21 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Telp/Fax.(0760)561631, 561632 KodePos 29362

TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 01 /DINSOS-PMD /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IWAN WAHYUDI, S.KOM
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Instansi : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMIATI
NPM : 220411071
Program Studi : Administrasi Negara
Alamat : Kelurahan Simpang Tiga Teluk kuantan
Fakultas : Ilmu Sosial

Telah melaksanakan penelitian kepada subjek penelitiannya pada tanggal 11 Februari 2026 dengan judul " Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi ".
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yang Membuat Pernyataan

an. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial


IWAN WAHYUDI, S.Kom
 NIP. 197608102002121007



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : RAHMIATI

NPM : 220411071

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. DESRIADI, S.SoS., M.Si
 2. SARJAN M, Sos., M.Si

JUDUL : PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
 SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL,
 OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	27/10-2025	Publiti Margi, Kutipan sesuai dg Survei Bantuan cekuk ming.			
2	31/10-2025	Rapikan BAB I pembukaan konsep dan teori yg ada			
3	6/11-2025	Rapikan bab 1a			
		Interman magan leat 5 org hapa?			
	11/11-2025	Rapikan BAB III			

14/11-2015	Buatlah proposal			
17/11-2015	penelitian Aca utu digi			
19/11-2015	Perbaiki Data DTB Baitan Pengeluaran			
	Data, Rencana angk Kendali & Kury.			
26/11-2015	Teliti Brokta tabel Kerangka pembi Kerangka Operasi Variabel			
9/12-2015	ada ujian seminar Proposal.			
	Perbaiki publikasi			
	Rapikan publikasi RMB V			



Form 12

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas Jaka Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Rahmiati

NPM : 220411071

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTJSEM) dalam
 Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial, DMD Kabupaten Kuantan
 Singingi

Hari/Tgl Ujian : Senin / 22 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form II

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Rahmiati
 NPM : 220411071
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : **Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dalam Penyeluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kuantan Singingi.**

Hari/Tgl Ujian : Rabu/ 17 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing I (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rahmiati
 Tempat/Tanggal Lahir : Rengat /31 Agustus 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum Bekerja
 Alamat : Kelurahan Simpang Tiga
 Alamat Email : rahmijunhui@gmail.com
 Pendidikan : 1. Tahun 2016 LULUS SD Negeri 018 Koto Teluk Kuantan
 2. Tahun 2019 LULUS SMP Negeri 1 Teluk Kuantan
 3. Tahun 2022 LULUS SMAN 1 Teluk Kuantan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 17 Juni 2026

Penulis

RAHMIATI
NPM.220411071